

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN NATUNA
MENURUT PENGGUNAAN 2011**

No. Publikasi :
Katalog BPS :
Ukuran Buku : 21 x 28 cm
Jumlah Halaman : iv + 39

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kabupaten Natuna

Penyunting :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kabupaten Natuna

Gambar Kulit :
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Kabupaten Natuna

Diterbitkan Oleh :



“Boleh Dikutip Dengan Menyebut Sumbernya”



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna telah dapat menyelesaikan publikasi “**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Tahun 2011 menurut Penggunaan**” . Publikasi ini merupakan penerbitan yang pertama di Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto menurut Penggunaan ini dirinci menurut komponennya, yaitu: Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori (Stock) dan Ekspor-Import. Untuk melengkapi publikasi ini juga disertai dengan penjelasan tentang konsep dan defenisi serta penjelasan PDRB menurut penggunaan.

Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan juga untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan ekonomi Kabupaten Natuna serta untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan bagi pemerintah daerah dilihat dari sisi penggunaan. Beberapa angka yang disajikan masih bersifat sangat sementara terutama tahun 2011 karena belum tersedianya data secara lengkap dan akan disempurnakan pada penerbitan selanjutnya.

Kepada semua pihak yang telah memberi bantuan sehingga terwujudnya publikasi ini, diucapkan terima kasih. Akhirnya segala kritik dan saran dari pengguna data sangat diharapkan demi penyempurnaan publikasi ini dimasa datang dan semoga publikasi ini bermanfaat.

Ranai, November 2012

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

E N D R A, SE.
NIP. 19641003 198603 1 004

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Kata Sambutan	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Kegunaan	3
BAB II Konsep dan Definisi	8
BAB III Metode Penghitungan dan Sumber Data	11
3.1 Pengeluaran Konsumsi RumahTangga	11
3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	12
3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15
3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	18
3.5 Perubahan Inventori (Stok)	20
3.6 Ekpor dan Impor	20
BAB IV Kondisi Perekonomian Kabupaten Natuna	21
Lampiran Tabel Pokok	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara/daerah, memerlukan bermacam data sebagai dasar penentuan strategi dan kebijakan agar sasarnya dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dilihat hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang merupakan ukuran kuantitas, mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan data dan informasi yang akurat, sehingga dibutuhkan berbagai indikator ekonomi yang mampu memberikan gambaran dan merepresentasikan kondisi perekonomiannya. Salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan aktivitas perekonomian di suatu daerah. Angka PDRB merupakan ukuran kuantitatif dari kegiatan ekonomi di suatu daerah dan dapat diturunkan nilai indikator pertumbuhan ekonomi secara umum, serta nilai pendapatan per kapita penduduk.

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), dan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). Nilai PDRB yang dihitung melalui pendekatan produksi menjelaskan bagaimana PDRB dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB yang demikian disebut sebagai PDRB menurut sektor atau biasa disebut sebagai PDRB dari sisi penyediaan (*supply side*). Sedangkan nilai PDRB yang dihitung melalui pendekatan pengeluaran menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi permintaan domestik di suatu wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan penduduk di luar wilayah tersebut. Nilai PDRB yang demikian disebut PDRB menurut

penggunaan atau menurut pengeluaran (*Gross Domestic Regional Product by Expenditure*), atau bisa juga disebut sebagai PDRB dari sisi permintaan (*demand side*).

Permintaan domestik dapat berupa konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto. Sedangkan permintaan dari luar wilayah berupa ekspor. Namun karena sebagian permintaan terhadap barang dan jasa dalam suatu wilayah termasuk barang dan jasa yang berasal dari luar wilayah (impor) maka dalam nilai PDRB menurut penggunaan, ekspor barang dan jasa dikurangi dengan impor barang dan jasa untuk memperoleh ekspor neto. Dalam PDRB menurut penggunaan, selisih antara permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) yang mencerminkan perbedaan statistik (*statistical discrepancy*) dicakup dalam perubahan stok (*change in stock*).

Penyusunan publikasi PDRB Kabupaten Natunan menurut penggunaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan data tentang komponen PDRB menurut penggunaan, misalnya pengeluaran konsumsi rumahtangga yang termasuk di dalamnya konsumsi makanan dan non makanan, pengeluaran konsumsi pemerintah baik berupa belanja barang, belanja pegawai, penyusutan, pengeluaran pembangunan dan sebagainya. Informasi yang disajikan tersebut diharapkan dapat membantu pengguna data terutama para peneliti sehingga lebih dapat memahami kondisi perekonomian Kabupaten Natuna dari sisi pengeluaran.

1.2. Ruang Lingkup

Setelah mempertimbangkan berbagai keterbatasan data, maka penyusunan PDRB menurut penggunaan untuk beberapa komponen penggunaan masih menggunakan metode tidak langsung, sehingga cakupan wilayahnya adalah Kabupaten Natuna. Adapun cakupan periode pembahasan adalah selama periode tahun 2011, dengan status data angka sementara. Tahun dasar yang digunakan pada penghitungan PDRB menurut penggunaan ini adalah tahun dasar 2000, sebagaimana juga dipergunakan untuk penghitungan PDRB menurut lapangan usaha.

1.3. Kegunaan

Berdasarkan tabel-tabel yang disajikan dalam PDRB menurut penggunaan dapat ditaksir berbagai besaran (peubah) serta perubahan kondisi perekonomian seperti besarnya produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi, dan diperdagangkan dengan daerah luar Kabupaten Natuna maupun luar negeri. Selain itu, dapat juga dilihat peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi, serta dapat mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.

<http://natunakab.bps.go.id>

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

PDRB menurut penggunaan disusun untuk menggambarkan pemakaian barang dan jasa yang diproduksi dan atau diimpor, yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Pemakaian barang dan jasa secara garis besar dikelompokkan menjadi dua macam yakni: penggunaan untuk konsumsi antara (digunakan untuk kebutuhan di dalam proses produksi), dan penggunaan untuk konsumsi akhir guna memenuhi kebutuhan konsumsi berbagai golongan dalam masyarakat.

2.1. Permintaan Akhir dan Permintaan Antara

Menurut konsep *System of National Account* (SNA), penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dikelompokkan menjadi :

2.1.1. Permintaan Antara/ Konsumsi Antara

Adalah permintaan sektor produksi terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang digunakan sebagai input antara dalam proses produksi. Contoh: kayu gelondongan dihasilkan oleh sub sektor kehutanan, digunakan oleh sektor industri sebagai bahan baku industri kayu olahan. Contoh lain: kelapa sawit yang dihasilkan oleh sub sektor Perkebunan digunakan oleh sektor industri sebagai bahan industri minyak sawit, serta masih banyak lagi contoh lain yang sejenis.

2.1.2. Permintaan Akhir/ Konsumsi Akhir

Adalah permintaan yang dilakukan oleh konsumen akhir terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, lembaga swasta nirlaba dan konsumsi pemerintah serta komponen permintaan akhir lainnya.

Komponen permintaan akhir yang dimaksud di sini antara lain mencakup:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- b. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba
- c. Pengeluaran konsumsi pemerintah

- d. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
- e. Perubahan stok (Inventori), dan
- f. Ekspor neto

Dalam kenyataan sehari-hari, barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akhir tersebut tidak saja berasal dari produk domestik, melainkan sebagian berasal dari produk regional lain atau impor. Dengan demikian secara ringkas Produk Domestik Regional Bruto menurut penggunaan dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y + M = C + I + S + E \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

Y : Produk Domestik Regional Bruto

M: Impor

C : Konsumsi rumah tangga, lembaga swasta nirlaba dan konsumsi pemerintah

I : Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

S : Perubahan stok

E : Ekspor

Karena yang dihitung hanya produk domestik atau pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, maka formulasi di atas dapat dimodifikasi menjadi:

$$Y = C + I + S + (E - M) \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

(E - M) : Ekspor neto, yakni ekspor dikurangi impor

2.2 KOMPONEN-KOMPONEN PENGGUNAAN

2.2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga

Dalam penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga ada dua pendekatan, yaitu;

1. Pengeluaran rumah tangga di wilayah domestik suatu daerah
2. Pengeluaran rumah tangga penduduk suatu daerah

Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada metode pendekatan yang pertama meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh anggota rumah tangga, baik penduduk daerah itu sendiri maupun penduduk daerah lain. Penduduk daerah lain seperti staf kedutaan asing, staf perwakilan daerah, dan turis asing. Sedangkan yang dimaksud pengeluaran yang dilakukan penduduk daerah itu saja tidak termasuk pengeluaran penduduk daerah lain. Dalam penghitungan pendapatan regional, konsep yang dipakai untuk menghitung pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah cara kedua. Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan dan non makanan. Pengeluaran makanan seperti bahan makanan, minuman, rokok, tembakau dsb, dan pengeluaran untuk non makanan seperti barang tahan lama, pakaian, bahan bakar, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, jasa-jasa, dan sebagainya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran untuk dikonsumsi tidak untuk keperluan lain seperti usaha rumah tangga. Jika seandainya ada sebagian dari pengeluaran tersebut digunakan untuk keperluan usaha, maka nilai seluruh pengeluaran tersebut harus dikurangi dengan besarnya nilai yang digunakan untuk keperluan usaha. Ada beberapa pengeluaran yang tidak dikategorikan sebagai konsumsi, antara lain;

- Pengiriman uang/menyumbang
- Pengeluaran untuk menabung
- Membeli surat-surat berharga/benda tak bergerak
- Premi asuransi (tidak termasuk asuransi jiwa)
- Membayar atau meminjam uang
- Membangun atau membeli rumah
- Pengeluaran untuk usaha rumah tangga

Sumber data yang dipergunakan untuk menghitung pengeluaran rumah tangga adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Perkiraan besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga didasarkan pada data pokok SUSENAS. Periode rujukan data konsumsi rumah tangga dari hasil SUSENAS adalah selama seminggu yang lalu untuk kelompok makanan dan minuman, serta selama sebulan yang lalu untuk kelompok non makanan. Oleh karena itu, untuk memperkirakan konsumsi setahun, digunakan pendekatan sebagai berikut :

- Untuk kelompok makanan, nilai konsumsi per kapita selama satu bulan diperkirakan dari nilai konsumsi selama seminggu dibagi 7, kemudian hasilnya dikalikan 30. Sedangkan nilai konsumsi selama setahun sama dengan nilai konsumsi selama sebulan dikali 12. Disamping itu digunakan juga data lainnya seperti pendapatan per kapita dari PDRB sektoral, rata-rata harga eceran dan Indeks Harga Konsumen, serta jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk perkiraan pengeluaran konsumsi rumahtangga atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan revaluasi untuk kelompok makanan.
- Untuk kelompok non makanan, nilai konsumsi per kapita selama satu tahun sama dengan nilai konsumsi selama satu bulan dikali 12. Disamping itu juga digunakan cara deflasi untuk kelompok bukan makanan dengan IHK sebagai deflatornya.

2.2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Swasta Nirlaba

Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Swasta Nirlaba pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang dapat dibedakan atas kegiatan produksi, penerimaan/pengeluaran dan kegiatan investasi. Kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap perekonomian. Didalam era reformasi, peran lembaga ini dalam usaha pembangunan akan semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena kegiatan yang dilakukan disamping meningkatkan volumen ekonomi juga berdampak pada peningkatan sumber daya manusia.

Lembaga Swasta Nirlaba adalah lembaga atau badan usaha swasta yang memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat, seperti lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan (kecuali

dokter praktek), badan keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan yang tidak mengutamakan keuntungan. Pengeluaran lembaga tersebut antara lain meliputi; pembelian dan penerimaan transfer dalam bentuk barang dan jasa, pembayaran upah gaji, penyusutan dan pajak tak langsung yang dibayar oleh lembaga bersangkutan.

2.2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Konsumsi pemerintah disebut juga dengan output non-pasar pemerintah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah (umum) meliputi konsumsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meliputi seluruh instansi negara, baik yang ada di pusat maupun kantor wilayah (vertikal) nya di daerah. Sedangkan pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah tingkat I (propinsi), pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota), dan pemerintah desa beserta perangkat (dinas) nya di masing-masing tingkat pemerintahan tersebut.

Besarnya konsumsi pemerintah diperkirakan sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kegiatan produksi. Biaya-biaya dimaksud antara lain meliputi:

- Pengeluaran pemerintah untuk membayar upah dan gaji pegawai sebagai balas jasa yang telah diberikan, selanjutnya disebut belanja pegawai, yaitu terdiri dari belanja pegawai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Sipil maupun Militer.
- Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam proses produksi, yang selanjutnya disebut belanja barang.
- Pengeluaran untuk penyusutan barang modal pemerintah.

Pengeluaran untuk belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang-barang yang tidak tahan lama, atau habis dipakai dalam proses produksi baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Datanya diperoleh dari belanja rutin pemerintah ditambah belanja pembangunan yang dipindahkan menjadi pengeluaran rutin, karena pengeluaran tersebut

menyangkut pengeluaran rutin, seperti pengeluaran pembangunan untuk pertahanan dan keamanan (hankam), proyek pendidikan, dan lain-lain.

Pengeluaran untuk belanja pegawai yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembayaran :

- Upah dan gaji dalam bentuk uang dan barang beserta tunjangannya
- Iuran dan jaminan sosial
- Iuran dana pensiun
- Asuransi kecelakaan, tabungan hari tua, dan sejenisnya

Data diperoleh dari belanja rutin pemerintah ditambah perkiraan upah dan belanja pembangunan.

Penyusutan barang modal yaitu penyisihan pendapatan yang akan digunakan untuk pembelian barang modal baru, karena barang modal lama pada suatu saat sudah tidak dipakai lagi.

2.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Yang dimaksud dengan PMTB meliputi berbagai macam pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru. Pengadaan barang modal tersebut dapat berupa pengadaan dari wilayah itu sendiri maupun dengan cara membeli dari wilayah lain atau impor. Termasuk pada pengeluaran untuk meningkatkan mutu dan perbaikan barang modal yang nilainya relatif besar sehingga berakibat bertambah panjang umur pemakaian, atau menaikkan kapasitas produksi dari barang modal tersebut.

2.2.5 Perubahan Stok (Inventori)

Pengertian stok di sini adalah persediaan barang pada akhir tahun baik berasal dari pembelian, yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik dalam bentuk barang jadi maupun barang setengah jadi.

Karena adanya keterbatasan data, maka data mengenai nilai perubahan stok dalam penggunaan PDRB ini masih merupakan perkiraan kasar, karena dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral, minus komponen permintaan akhir lainnya, seperti pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi lembaga nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, dan ekspor netto. Jadi, di dalam nilai

perubahan stok tersebut, masih terkandung selisih statistik (*statistical discrepancy*) yang terdapat pada komponen lainnya.

2.2.6 Ekspor dan Impor

Kegiatan ekspor dan impor meliputi suatu transaksi yang terjadi atas suatu barang dan jasa antara penduduk (*resident*) suatu daerah dengan daerah lain yang melintasi batas geografis suatu daerah tanpa memandang barang tersebut baru atau bekas. Barang dan jasa yang diperdagangkan untuk kepentingan luar daerah atau luar negeri disebut sebagai suatu komoditas ekspor, sedangkan yang dibeli dari luar daerah atau luar negeri disebut komoditas impor.

Meliputi ekspor dan impor barang, pengangkutan, komunikasi, jasa-jasa, asuransi dan berbagai jasa lainnya seperti jasa perdagangan yang diterima oleh pedagang daerah/wilayah tersebut yang kegiatannya mengadakan transaksi barang di luar daerah atau wilayah lain, termasuk juga di sini transaksi barang tertentu seperti barang dan jasa yang langsung dibeli oleh bukan penduduk wilayah tersebut.

Barang-barang yang melintasi batas geografis suatu daerah/wilayah yang merupakan tempat persinggahan saja dalam perjalanan menuju atau kembali ke suatu tempat, seperti barang-barang kepunyaan turis atau penumpang, semuanya tidak termasuk kegiatan ekspor atau impor. Barang-barang keperluan pelayaran atau penerbangan yang dibeli pada waktu merapat di pelabuhan luar daerah/wilayah atau luar negeri, dan ikan yang langsung dijual oleh kapal-kapal penangkap ikan milik penduduk suatu daerah/wilayah kepada kapal asing atau daerah/wilayah lain, merupakan transaksi barang dan jasa yang harus dimasukkan sebagai ekspor dan impor. Kegiatan ekspor-impor dirinci sebagai berikut : Ekspor-impor antar negara (diluar negeri) dan Ekspor-impor antar pulau (antar daerah/wilayah).

BAB III

METODE PENGHITUNGAN DAN SUMBER DATA

3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga, adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kabupaten Natuna, hasil pengolahan Badan Pusat Statistik untuk besarnya konsumsi. Sedangkan untuk harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi diperoleh dari hasil pengolahan Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. Dari hasil SUSENAS diperoleh rata-rata konsumsi per kapita per minggu untuk bahan makanan dan rata-rata nilai konsumsi per bulan untuk non makanan. Untuk memperoleh nilai konsumsi bahan makanan sebulan dengan cara konsumsi per kapita per minggu dikalikan tiga puluh dibagi tujuh. Nilai konsumsi bahan makanan dan bukan makanan setahun diperoleh dengan cara nilai konsumsi per kapita per bulan dikali dua belas dikalikan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Perkiraan nilai konsumsi rumah tangga untuk tahun yang tidak tersedia data SUSENAS dengan cara menghitung kenaikan inflasi, baik bahan makanan maupun bukan makanan, berdasarkan konsumsi per kapita per minggu untuk bahan makanan dan nilai konsumsi per kapita per bulan untuk bukan makanan. Nilai konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi, yaitu membagi konsumsi harga berlaku dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ini telah dilengkapi dengan perkiraan besarnya konsumsi makanan/minuman yang dikonsumsi di luar rumah.

3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit/swasta nirlaba yang melayani rumah tangga (LNPRT) mencakup berbagai pengeluaran oleh lembaga untuk pengadaan barang dan jasa, yang secara prinsip bertujuan untuk biaya operasional atau pengeluaran dalam melayani rumah tangga. Pengeluaran konsumsi LNPRT digolongkan sebagai bagian dari pengeluaran konsumsi akhir yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan lembaga.

LNPRT merupakan satu entitas legal, yang secara prinsip terlibat dalam kegiatan layanan atau pemberian jasa kepada rumah tangga (*non-market*). Sebagian besar kegiatan lembaga bersumber dari sumbangan atau donasi rumah tangga. Umumnya pekerja yang aktif dalam kegiatan lembaga merupakan tenaga kerja tidak dibayar (*volunteer*).

Perkiraan nilai pengeluaran konsumsi LNPRT dapat dilakukan dengan menggunakan metoda langsung maupun metoda tidak langsung. Metoda langsung yaitu metoda penghitungan yang didasarkan pada data hasil survei atau sensus. Sedangkan metoda tidak langsung didasarkan pada pengeluaran lembaga lain (contoh RT) untuk membiayai kegiatan LNPRT.

1. Metode Langsung

Dengan menggunakan metode langsung data pengeluaran konsumsi LNPRT diperoleh melalui pencacahan secara sample. Nilai yang dimaksud merupakan hasil estimasi rata-rata biaya layanan dari sampel sebagai berikut :

Rata-rata biaya layanan per lembaga, yaitu:

$$\bar{x}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}}{n_i}$$

Dimana x_{ij} = nilai biaya layanan untuk lembaga ke j dari bentuk LNPRT kode-i
 \bar{x}_i = rata-rata biaya layanan LNPRT kode-i
 n_i = banyaknya sampel LNPRT kode-i

Jika rata-rata biaya layanan LNPRT per bentuk lembaga (\bar{x}_i) dikalikan dengan populasi bentuk LNPRT kode i (N_i), maka akan diperoleh estimasi nilai pengeluaran konsumsi bentuk LNPRT kode-i (x_i) atau $x_i = \bar{x}_i \cdot N_i$.

Nilai estimasi pengeluaran konsumsi LNPRT merupakan penjumlahan nilai pengeluaran konsumsi seluruh bentuk LNPRT

$$\left(\sum_{i=1}^{n=7} x_i \text{ atau } \sum_{i=1}^{n=7} \bar{x}_i \cdot N_i \right)$$

Perhitungan biaya layanan LNPRT atas dasar harga konstan dihitung menggunakan bobot IHK untuk masing-masing rincian pengeluaran dengan rumus: $m_k = \frac{x_k}{a_k}$,
dimana :

- m_k = biaya layanan rincian pengeluaran ke-k (adh konstan)
- x_k = biaya layanan rincian pengeluaran ke-k (adh berlaku)
- a_k = IHK untuk rincian pengeluaran ke-k
- k = rincian pengeluaran 1,2,...,n

Sehingga total nilai biaya layanan adh konstan untuk masing-masing lembaga adalah:

$$M = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{a_k}$$

Dengan cara perhitungan di atas (M), maka dapat dihitung nilai biaya layanan adh konstan untuk setiap bentuk lembaga sebanyak sampel (n_i), sebagai berikut:

$$Y_i = \sum_{k=1}^n M_{ij}$$

dimana:

- Y_i = Nilai konsumsi akhir bentuk LNPRT kode i (adh konstan)
- M_{ij} = Biaya layanan adh konstan lembaga ke j dari bentuk lembaga kode i
- i = Kode bentuk lembaga 1,2,...,7
- j = Urutan lembaga dari bentuk lembaga kode i = 1,2,..., n_i

Sedangkan nilai total pengeluaran konsumsi untuk seluruh lembaga adh konstan adalah

$$\sum_{i=1}^7 Y_i \text{ atau } \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}, \text{ (i = kode lembaga 1,2,...,7; j = no urut lembaga kode i = 1,2,...,n}_i)$$

Total biaya layanan masing-masing bentuk LNPRT adh konstan (M_i) dibagi dengan banyaknya sampel untuk setiap bentuk lembaga i yang bersangkutan $\left(\overline{M}_i = \frac{M_i}{n_i}\right)$ akan menghasilkan nilai rata-rata pengeluaran LNPRT kode i (adh konstan). Jika dikalikan dengan populasi masing-masing bentuk lembaga atau $\left(\overline{M}_i = N_i\right)$ hasil ini akan menghasilkan nilai estimasi pengeluaran konsumen bentuk LNPRT kode i (adh konstan). Penjumlahan dari nilai pengeluaran konsumsi daru seluruh bentuk LNPRT $\left(\sum_{i=1}^7 \overline{M}_i = N_i\right)$ merupakan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT (adh konstan).

2. Metode Tidak Langsung

Metode ini memperkenalkan cara menghitung estimasi pendapatan LNPRT (sebagai sumber pembiayaan) berdasarkan pengeluaran dari lembaga lain yang membiayai kegiatan LNPRT. Caranya adalah dengan menghitung besaran pengeluaran unit atau lembaga lain yang menjadi penyumbang (donatur) kegiatan LNPRT tersebut. Sebagai contoh bila pengeluaran untuk LNPRT adalah sebesar n persen dari total nilai pengeluaran konsumsi RT, maka besaran pendapatan LNPRT adalah n persen dikali total pengeluaran konsumsi RT (pendekatan pengeluaran). Untuk menghitung komposisi pengeluaran LNPRT digunakan rasio dari hasil survei khusus. Dapat diasumsikan bahwa LNPRT pada dasarnya tidak bertujuan mencari untung, maka total penerimaan sama dengan total pengeluaran.

Untuk mengukur pertumbuhan riil pengeluaran konsumsi LNPRT dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan berikut :

- i. metode deflasi yaitu dengan membagi estimasi pengeluaran konsumsi LNPRT adh berlaku dengan IHK yang sesuai; dan
- ii. metode rasio pengali tetap atau menaksir penerimaan LNPRT berdasarkan pengeluaran RT, yaitu dengan mengalikan rasio (tetap) terhadap nilai pengeluaran konsumsi RT adh konstan.

$$Y_{LNPRT} = r \% \times CRT$$

dimana:

$$Y_{LNPRT} = \text{Pendapatan LNPRT}$$

$$r \% = \text{proporsi pengeluaran rumah tangga untuk LNPRT}$$

$$CRT = \text{Pengeluaran total konsumsi rumah tangga}$$

Dengan asumsi pendapatan LNPRT sama dengan konsumsi LNPRT, maka

$$Y_{LNPRT} = (C_{LNPRT})$$

Sumber data yang digunakankan untuk menghitung pengeluaran konsumsi LNPRT diperoleh dari hasil survei khusus. Data tersebut dalam bentuk nilai pengeluaran atas barang dan jasa oleh lembaga serta barang dan jasa dari transfer pihak lain, yang digunakan dalam rangka menghasilkan jasa layanan.

Data pendukung yang dibutuhkan adalah IHK per kelompok pengeluaran. Data ini digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi LNPRT adh konstan.

Untuk melakukan estimasi pengeluaran konsumsi LNPRT masih diperlukan data lain, yaitu jumlah populasi LNPRT masing-masing bentuk lembaga. Data ini diperoleh dari hasil kegiatan 'listing' ke instansi atau lembaga pembina dari unit LNPRT yang bersangkutan, maupun dengan pengecekan langsung ke lapangan.

3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Untuk menghitung pengeluaran konsumsi pemerintah, terlebih dahulu harus disusun neraca produksi pemerintah merupakan salah satu komponennya. Neraca produksi pemerintah terdiri dari pengeluaran untuk biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial), balas jasa pegawai/belanja pegawai dan penyusutan di sisi kiri, serta konsumsi pemerintah (output non pasar) dan penjualan dari barang dan jasa (output pasar) di sisi kanan. Uraian komponen-komponen neraca produksi pemerintah adalah sebagai berikut:

- i. Output pemerintah terdiri dari output pasar dan output non pasar adalah output yang dihasilkan oleh pemerintah yang digunakan sendiri oleh pemerintah atau disebut juga dengan konsumsi pemerintah, yaitu barang dan jasa yang digunakan sendiri sebagai konsumsi akhir oleh pemerintah. Sedangkan output pasar pemerintah merupakan penjualan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah yang disuplai secara gratis, atau atas dasar harga secara ekonomi tidak berarti, kepada instansi lain atau masyarakat.
- ii. Biaya antara adalah pemakaian barang yang tidak tahan lama serta jasa dan bantuan sosial yang digunakan sebagai input dalam menghasilkan output pemerintah.
- iii. Nilai tambah bruto pemerintah merupakan penjumlahan dari balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan penyusutan. Balas jasa pegawai merupakan pembayaran yang diterima pegawai secara langsung sehubungan dengan pekerjaannya, baik dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan penyusutan merupakan nilai yang disisihkan sebagai pengganti susut atau ausnya barang modal pemerintah karena dipakai dalam proses produksi.

3.3.1 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga (adh) Berlaku

Nilai konsumsi pemerintah sama dengan total output dikurangi nilai barang dan jasa yang dijual. Sedangkan total input merupakan penjumlahan dari biaya antara (belanja barang dan

bantuan sosial) dan nilai tambah bruto (belanja pegawai dan penyusutan). Mengingat di dalam neraca produksi pemerintah, total output sama dengan total input, maka nilai pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan pengurangan total input dengan penjualan barang dan jasa pemerintah.

Untuk pemerintah pusat, data biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial) dan belanja pegawai didapat dari rincian pengeluaran APBN. Sedangkan penjualan barang dan jasa diperoleh dari rincian penerimaan APBN, khususnya pada bagian penerimaan bukan pajak lainnya, yaitu penjualan barang dan jasa dari semua unit pemerintah pusat. Sementara itu, penyusutan diestimasi dengan menggunakan persentase tertentu terhadap belanja modal.

Untuk pemerintah daerah, data biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial) dan belanja pegawai didapat dari rincian pada sisi pengeluaran APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan desa. Sedangkan penyusutan diestimasi dengan menggunakan persentase tertentu terhadap belanja modal. Nilai penjualan barang dan jasa (output pasar) didapat dari rincian pada sisi penerimaan APBD pada bagian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), yaitu rincian penerimaan lain-lain. Nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan adalah jumlah penjualan barang dan jasa pada setiap tingkat pemerintahan yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota dan desa (untuk pemerintah desa data tidak tersedia).

Biaya antara, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah Provinsi mencakup biaya antara, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah Provinsi, ditambah dengan biaya antara, belanja pegawai dan nilai penjualan barang dan jasa pemerintah pusat yang menjadi bagian dari biaya antara, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah Provinsi.

3.3.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga (adh) Konstan

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adh konstan merupakan hasil penghitungan komponen-komponen neraca produksi adh konstan. Biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial) adh konstan didapat dengan men-deflate biaya antara atas dasar harga berlaku dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) tanpa sektor ekspor.

Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan didapat dengan mengekstrapolasi nilai tambah bruto pada tahun dasar dengan indeks jumlah pegawai negeri sipil. Untuk penjualan

barang dan jasa atas dasar harga konstan didapat dengan mempergunakan persentase penjualan barang dan jasa terhadap output pada harga berlaku.

Untuk menghitung harga konstan konsumsi pemerintah dibutuhkan dua buah indeks, yaitu indeks jumlah pegawai negeri sipil dan indeks harga perdagangan besar (IHPB) propinsi X, yang digunakan sebagai ekstrapolator belanja pegawai dan deflator biaya antara. Untuk menghitung indeks jumlah pegawai negeri sipil dibutuhkan data jumlah pegawai negeri sipil propinsi X menurut golongan kepangkatan, dan data jumlah gaji (termasuk tunjangan struktural dan fungsional menurut golongan per bulan). Indeks yang digunakan untuk menghitung indeks jumlah pegawai negeri sipil, adalah indeks Laspeyres yang dimodifikasi seperti berikut:

$$I_j = \frac{\sum_{j=1}^4 \frac{Q_{n,j}}{Q_{0,j}} \times Q_{0,j} P_{0,j}}{\sum_{j=1}^4 Q_{0,j} P_{0,j}} = \frac{\sum_{j=1}^4 Q_{n,j} P_{n,j}}{\sum_{j=1}^4 Q_{0,j} P_{0,j}}$$

dimana:

- I_j = Indeks jumlah pegawai pada tahun n
- P_{o,j} = Bagian gaji golongan j terhadap total gaji pegawai pada tahun dasar, tahun dasar 2000
- Q_{o,j} = Jumlah pegawai menurut golongan pada tahun dasar
- Q_{n,j} = Jumlah pegawai golongan j pada tahun ke n
- j = Golongan I, II, III, IV

Sumber data yang digunakan dalam menyusun pengeluaran pemerintah ada berbagai macam data, yakni sebagai berikut:

- a. Untuk pemerintah daerah, data Statistik Keuangan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa yang diperoleh dari daftar K1, K2 dan K3. Data tersebut memuat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing tingkat pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa).
- b. Data jumlah pegawai negeri sipil yang dirinci menurut status pegawai, golongan, departemen/lembaga, dan provinsi yang diperoleh dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah).

3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu: secara langsung dan secara tidak langsung.

a. Pendekatan secara langsung

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha). Pendekatan dengan cara ini menuntut tersedianya data PMTB yang dikuasai oleh seluruh sektor lapangan usaha secara rinci. Padahal barang modal yang dikuasai oleh sektor-sektor tersebut sangatlah beragam.

Penilaian PMTB adalah atas dasar harga pembeli, yaitu harga barang modal ditambah dengan biaya-biaya lain yang dikeluarkan, seperti biaya transport, biaya instalasi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut, termasuk pula biaya bea masuk dan pajak tak langsung.

b. Pendekatan secara tidak langsung

Pendekatan secara tidak langsung disebut juga sebagai metode arus komoditas (*commodity flow*) atau pendekatan dari sisi penyediaan barang modal. Pendekatan dengan cara ini membutuhkan ketersediaan data dari sisi penyediaan barang modal (*supply side*), baik dari produksi domestik maupun dari wilayah lain. Metode ini masih banyak digunakan di banyak negara karena alasan kemudahannya secara teknis.

Estimasi nilai PMTB dalam bentuk bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu terhadap output sektor konstruksi, baik untuk perhitungan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pada jenis barang modal ini diasumsikan semuanya berasal dari produksi domestik.

Estimasi nilai PMTB yang berupa mesin, angkutan dan barang modal lainnya dibedakan menurut barang modal yang berasal dari produksi dalam negeri dan yang berasal dari impor. Penghitungan PMTB berupa mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya yang berasal dari dalam negeri diperoleh dengan 2 cara, yaitu yang pertama mengalokasikan output mesin, angkutan dan barang modal lainnya yang menjadi bagian dari pembentukan modal, ditambah biaya angkut dan margin perdagangan. Dari perhitungan tersebut akan diperoleh estimasi PMTB atas dasar harga berlaku.

Untuk memperoleh pembentukan modal yang berupa mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya atas dasar harga konstan adalah dengan mendeflate PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB masing-masing jenis barang yang sesuai. Apabila data IHPB tidak tersedia maka dapat dilakukan dengan metode ekstrapolasi yaitu mengalikan nilai barang modal pada seri harga konstan dengan indeks volume masing-masing jenis barang modal. Sebagai contoh PMTB mesin, angkutan dan barang modal lainnya yang berasal dari dalam negeri yang diperoleh dengan cara ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan indeks produksi Industri Pengolahan 5 digit KLUI (tertimbang) dari masing-masing jenis barang sebagai ekstrapolatornya. Kemudian untuk memperoleh nilai berlakunya, nilai pembentukan modal berupa atas harga konstan tersebut direflate dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal.

Estimasi PMTB yang berupa mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya yang berasal dari impor dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: Pertama dari PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh nilai total barang impor, kemudian untuk merinci menjadi mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya digunakan alokator barang modal impor dengan kode SITC 3 digit. Kedua untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstannya dideflate dengan menggunakan indeks harga yang sesuai sebagai deflatornya.

Sumber data yang dibutuhkan untuk melakukan penghitungan pembentukan modal, yaitu: output bangunan dari neraca industry; nilai barang modal impor dari statistik distribusi perdagangan luar negeri; laporan keuangan perusahaan-perusahaan (pendekatan langsung); data PMTB sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan Air Bersih, sektor bangunan diperoleh melalui survei masing-masing perusahaan sektor tersebut; jumlah kendaraan yang dioperasikan oleh setiap subsektor pada sektor transportasi dapat diperoleh dari dinas-dinas masing-masing angkutan, sedangkan pengeluaran untuk pembuatan terminal, pelabuhan, kantor-kantor dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan angkutan diperoleh dengan mengadakan survey ke perusahaan-perusahaan.

3.5 Perubahan Inventori (Stok)

Perubahan stok pada suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai stok pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai stok pada akhir tahun sebelumnya (pada awal tahun yang bersangkutan). Dalam menghitung perubahan stok dapat dilakukan dengan dua metode yakni:

a. Metode Langsung

Nilai stok diperoleh dari setiap kegiatan dan jenis barang yang dikumpulkan melalui sensus dan survei. Berdasarkan laporan neraca keuangan perusahaan dari hasil survei tahunan diperoleh nilai stok pada awal tahun dan akhir tahun, yang kemudian dinilai dengan harga pasar pada periode tahun penghitungan tersebut.

b. Metode Tidak Langsung (Metode Arus Barang)

Menghitung stok awal dan stok akhir dari setiap jenis barang. Data seperti ini mungkin tersedia hanya untuk beberapa jenis barang. Oleh karena itu maka komponen perubahan stok diestimasi berdasarkan residual dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung secara sektoral dikurangi dengan komponen-komponen yang sudah dihitung dengan data yang tersedia.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penghitungan perubahan inventori (stok) adalah data komoditas perkebunan; laporan perusahaan-perusahaan terkait; indeks harga implicit PDB sektor terpilih, dan indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.

3.6 Ekspor dan Impor

Data yang tersedia mengenai ekspor dan impor di tingkat region masih sangat terbatas. Ekspor dan impor di tingkat region ini meliputi transaksi yang dilakukan langsung dengan luar negeri dan antar pulau, antar kabupaten/kota atau antar provinsi. Dari nilai ekspor dan impor luar negeri maupun antar pulau masing-masing tahun diperoleh nilai ekspor dan impor atas dasar harga berlaku.

Pendekatan metode yang digunakan untuk menilai transaksi perdagangan antar-wilayah atau daerah adalah:

1. Metode Langsung

Dengan melakukan survey khusus arus barang maupun jasa yang keluar maupun yang masuk ke dalam daerah tersebut. Survei khusus yang dirancang harus berorientasi pada berbagai hal di antaranya jenis barang, harga barang, asal barang dan tujuan penggunaannya di daerah tersebut.

Identifikasi kebutuhan barang dan jasa yang berasal dari impor. Dari raw data SUSENAS Modul dapat dilihat kebutuhan akan barang dan jasa di suatu daerah. Dengan membandingkan produk daerah (domestik) dengan kebutuhan daerah tersebut.

2. Metode Tidak Langsung

Untuk produksi barang dengan menggunakan data sekunder yang dilakukan survey terhadap pelabuhan-pelabuhan. Untuk produk jasa dengan data sekunder dari Bank Indonesia, Dinas Pariwisata, dan perusahaan-perusahaan multiregional.

Untuk memperoleh nilai ekspor atas dasar harga konstan 2000 dengan cara nilai ekspor dideflate dengan indeks harga perdagangan besar umum ekspor tanpa minyak dan nilai impor dideflate dengan indeks harga perdagangan besar kelompok impor.

Nilai barang yang keluar antar pulau atau antar region atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mendeflate masing-masing dengan IHPB umum. Data mengenai ekspor dan impor luar negeri diperoleh dari statistik tahunan ekspor dan impor terbitan dari BPS.

Nilai Ekspor penghitungannya ditaksir sebagai residual karena tidak tersedianya data yang diperlukan untuk membuat perkiraan nilai ekspor. Dengan demikian nilai ekspor merupakan sisa, yaitu PDRB yang telah dihitung menurut lapangan usaha dikurangi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan ditambah impor baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

BAB IV

KONDISI PEREKONOMIAN KABUPATEN NATUNA

Perekonomian Kabupaten Natuna pada tahun 2011 relatif lebih baik dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna sebesar 6,41 persen bila dibandingkan dengan tahun 2010 hanya sebesar 6,25 persen. Dilihat dari sisi sektoral/lapangan usaha, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan ekonomi lokal, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, maupun peningkatan ekspor barang dan jasa.

Bila dicermati dari sisi penggunaan, PDRB Kabupaten Natuna di dipengaruhi oleh berbagai komponen pengeluaran yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal atau investasi serta ekspor-impor. Tahun 2011 perekonomian Kabupaten Natuna di topang oleh pengeluaran konsumsi pemerintah yaitu sebesar 66,04 persen, kemudian diikuti konsumsi rumah tangga sebesar 58,21 persen dan impor sebesar 54,72 persen. Sedangkan kontribusi yang paling kecil dalam pembentukan PDRB dari sisi penawaran adalah komponen pengeluaran konsumsi swasta nirlaba yaitu hanya sebesar 0,41 persen.

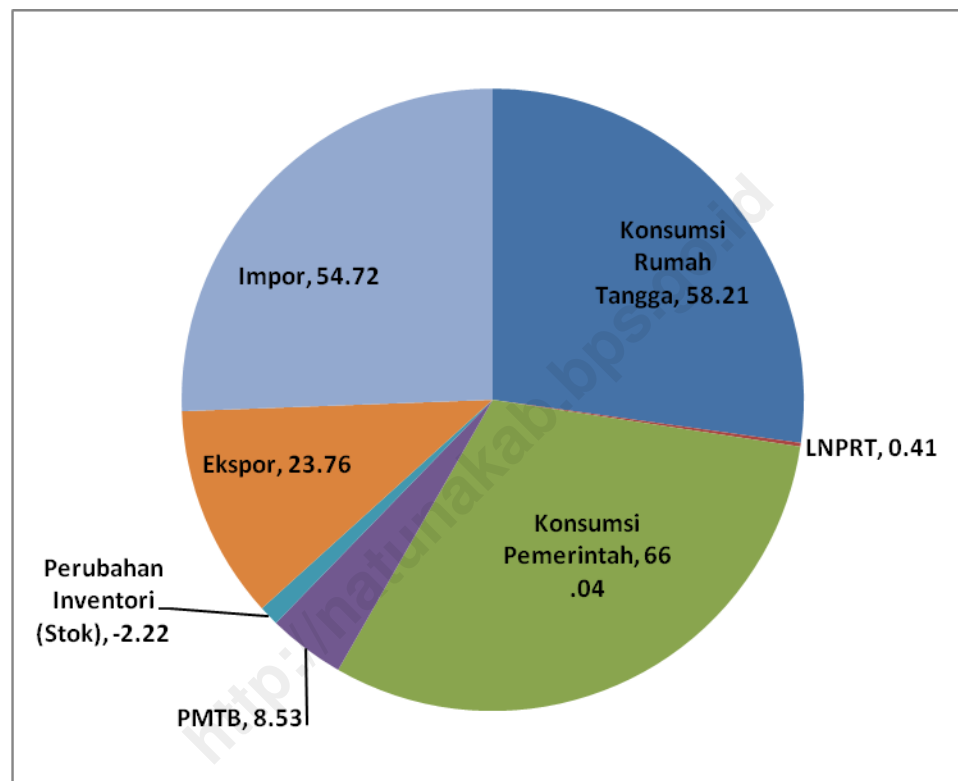
PDRB Kabupaten Natuna atas dasar harga berlaku terus meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 mencapai angka sebesar Rp. 977.7 milyar, dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.076 trilyun, serta tahun 2011 mencapai angka sebesar Rp. 1.191 trilyun atau meningkat sekitar 10,69 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peranan konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga dan impor merupakan pengeluaran yang dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna. Pada tahun 2010 nilai konsumsi pemerintah sebesar Rp. 632,8 milyar, pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp. 786,6 milyar yang berarti mengalami peningkatan sebesar 24,31 persen. Sedangkan konsumsi rumah tangga tahun 2010 sebesar Rp. 524,8 milyar meningkat sebesar Rp.693,3 milyar atau meningkat sebesar 24,02 persen, sedangkan Impor dari Rp. 539,5 milyar tahun 2010 menjadi Rp. 636,3 milyar di tahun 2011.

Dilihat dari kontribusi masing-masing komponen pengeluaran terhadap total PDRB Kabupaten Natuna secara persentase konsumsi pemerintah tahun 2010 sebesar 58,76 persen

meningkat ditahun 2011 menjadi 66,04 persen , kemudian diikuti oleh konsumsi rumahtangga dari 48,78 persen pada tahun 2010 meningkat menjadi 58,21 persen pada tahun 2011, sedangkan Impor dari 50,10 persen pada tahun 2010 menjadi 53,42 persen di tahun 2011.

Gambar 4.1
Struktur PDRB Kabupaten Natuna Menurut Penggunaan Tahun 2011



Sumber: BPS Kabupaten Natuna

PDRB Kabupaten Natuna tahun 2011 menurut penggunaan yang dihitung berdasarkan harga konstan 2000 sebesar Rp. 458,7 milyar, relatif meningkat sekitar 6,41 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 431 milyar. Dilihat dari sisi komponennya, konsumsi pemerintah merupakan komponen pertama yang menyumbangkan terbesar terhadap PDRB Kabupaten Natuna atas dasar harga konstan 2000. Yaitu sebesar Rp. 434,7 milyar pada tahun 2011, dan tahun 2010 menyumbangkan Rp. 349,7 milyar atau meningkat sebesar 24,31 persen. Pengeluaran terbesar ke dua disumbangkan oleh Impor sebesar Rp. 382,2 milyar, sedangkan yang ke tiga konsumsi rumahtangga, yaitu sebesar Rp. 334,7 milyar.

Tabel 4.1
PDRB Kabupaten Natuna Menurut Penggunaan
Tahun 2010-2011
(Jutaan Rupiah)

Jenis Penggunaan	Harga Belaku		Harga Konstan 2000	
	2010*)	2011**)	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	524.854,76	693.314,33	269.869,91	334.700,36
2. Pengeluaran Konsumsi Swasta Nirlaba	4.788,45	4.9892,09	2.493,85	2.659,57
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	632.788,07	786.604,71	349.698,67	434.702,6
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	99.311,06	101.660,61	13.665,30	15.868,2
5. Perubahan Inventori	7.602,34	(26.500,55)	(47.223,55)	(142.489,11)
6. Ekspor Barang dan Jasa	239.476,48	282.971,21	162.379,53	195.447,68
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	431.865,73	651.800,67	319.864,45	382.228,75
PDRB	1,076.955,42	1,191.141,73	431.019,26	458.660,57

Catatan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara
(Sumber: BPS Kab.Natuna)

Tabel 4.2. Distribusi PDRB Kabupaten Natuna
Menurut Penggunaan Tahun 2010-2011 (Persen)

Jenis Pengeluaran	2010	2011
(1)	(2)	(3)
Konsumsi Rumah tangga	48.74	58.21
Konsumsi Lembaga Nirlaba	0.44	0.41
Konsumsi Pemerintah	58.76	66.04
PMTB	9.22	8.53
Perubahan Stok	0.71	(2.22)
Ekspor	22.24	23.76
(-) Impor	40.10	54.72
PDRB Kabupaten Natuna	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab.Natuna

4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pengeluaran makanan dan non makanan. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar ke dua di Kabupaten Natuna. Ada sebesar 24,02 persen dari nilai tambah perekonomian Kabupaten Natuna digunakan untuk konsumsi rumahtangga.

Apabila ditelusuri lebih jauh, struktur pengeluaran konsumsi rumahtangga di Kabupaten Natuna masih didominasi oleh konsumsi makanan. Dari tabel 4.3. diketahui bahwa distribusi konsumsi makanan terhadap nilai PDRB Kabupaten Natuna relatif mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2010 distribusinya sebesar 26,08 persen meningkat menjadi 31,15 persen pada tahun 2011. Begitu juga halnya dengan distribusi konsumsi bukan makanan. Pada tahun 2010 menyumbang sebesar 22,66 persen dan meningkat sebesar 27,06 persen. Peningkatan ini terjadi dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Natuna dalam hal mengkonsumsi makanan, minuman, rokok, tembakau dsb serta pakaian, bahan bakar, jasa-jasa dan lain-lain.

Tabel 4.3

Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Tahun 2010-2011 (Persen)

Jenis Penggunaan	Distribusi		Laju Pertumbuhan	
	2010*)	2011**)	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi Rumah Tangga	48.74	58.21	15.58	24.02
Makanan	26.08	31.15	15.65	26.79
Non Makanan	22.66	27.06	15.43	18.48

Catatan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara
(Sumber: BPS Kab.Natuna)

Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumahtangga pada tahun 2011 relatif lebih meningkat dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 mencapai 24,02 persen. Untuk konsumsi berupa makanan mengalami pertumbuhan 26,79 persen dan konsumsi non makanan tumbuh sebesar 18,48 persen. Sedangkan tahun 2010 pengeluaran

konsumsi rumahtangga hanya sebesar 15.58 persen dengan konsumsi berupa makanan sebesar 15.65 persen dan non makanan sebesar 15,43 persen. Hal ini bisa disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat Kabupaten Natuna yang cenderung berubah ke arah yang lebih konsumtif seiring di samping juga pengaruh faktor penambahan penduduk.

4.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Nirlaba

Lembaga nirlaba atau lembaga non profit (LNP) merupakan salah satu jenis unit institusi yang ada dalam suatu perekonomian. Lembaga yang dimaksud disini adalah lembaga yang melayani rumahtangga. Lembaga ini bersifat formal ataupun informal yang dibentuk oleh perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah atau oleh dunia usaha, dalam rangka menyediakan jasa sosial kemasyarakatan bagi anggota maupun kelompok masyarakat tertentu tanpa adanya motivasi untuk meraih keuntungan. Lembaga ini meliputi organisasi kemasyarakatan (ORMAS), organisasi sosial (ORSOS), organisasi profesi (ORPROF), perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga dan hobi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan.

Di Kabupaten Natuna, lembaga nirlaba masih relatif sedikit jumlahnya dan kegiatannya pun seringkali *vacum*. Dapat dikatakan, lembaga-lembaga tersebut hanya aktif pada saat ada *event* tertentu saja. Misalnya, menjelang pemilihan umum atau peristiwa khusus lainnya.

Diantara komponen-komponen penyusun PDRB menurut penggunaan, pengeluaran konsumsi akhir lembaga nirlaba mempunyai pengeluaran/distribusi yang paling kecil. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pengeluaran konsumsi nirlaba mengalami penurunan. Pada tahun 2010 pengeluaran konsumsi nirlaba sebesar Rp. 4,78 milyar dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 4,89 milyar atau hanya tumbuh sebesar 2,16 persen. Sedangkan di tahun 2010 tumbuh sebesar 7,93 persen. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2010 lembaga non profit banyak yang aktif dan ditahun 2011 menjadi *vacum* kembali. Hal ini didukung oleh laju pertumbuhan di tahun 2010 sebesar 6,81 persen dan ditahun 2011 menjadi 6.65 persen.

4.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran pemerintah Kabupaten Natuna untuk membiayai kegiatannya dari tahun ke tahun tampaknya semakin meningkat, apalagi kabupaten ini sebagai kabupaten yang tergolong masih baru. Kebutuhan dalam kegiatan pemerintahan yang meliputi belanja barang maupun belanja pegawai semakin meningkat setiap tahun.

Seperti terlihat pada tabel 4.1. distribusi untuk pengeluaran konsumsi akhir pemerintah mempunyai kecenderungan meningkat. Pada tahun 2010 pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar Rp 632,8 milyar dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 786,6 milyar atau tumbuh sebesar 24,31 persen. Peningkatan distribusi pada pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ini sejalan dengan semakin meningkatnya APBD Kabupaten Natuna. Bila dilihat dari laju pertumbuhannya pengeluaran konsumsi akhir pemerintah yang merupakan pengeluaran yang terbesar. Laju pertumbuhannya mencapai 24,31 persen ditahun 2011 sedangkan di tahun 2010 hanya 22,41 persen.

4.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto dapat digolongkan dalam bentuk bangunan/konstruksi, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan. Barang modal tersebut merupakan peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun.

Pada tabel 4.2. dapat dilihat bahwa dalam proporsinya terhadap penggunaan PDRB Kabupaten Natuna, distribusi komponen pembentukan modal tetap bruto mengalami penurunan selama periode 2010-2011, meskipun tidak terlalu besar. Yaitu dari 9,22 persen menjadi 8,53 persen atau Rp. 99,3 milyar ditahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp. 101,7 milyar. Dapat dikatakan bahwa penggunaan dari nilai tambah yang diperoleh untuk pembentukan modal tetap bruto di Kabupaten Natuna memang belum optimal. Masih kurangnya investor yang datang untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Natuna menjadi salah satu penyebab kecilnya proporsi komponen pembentukan modal tetap bruto terhadap penggunaan PDRB Kabupaten Natuna.

Meskipun demikian, untuk kedepannya pembentukan modal tetap bruto di Kabupaten Natuna diperkirakan akan semakin meningkat, mengingat Kabupaten Natuna mempunyai

potensial yang cukup tinggi untuk perkembangan perekonomian terutama dari hasil alamnya yang melimpah. Ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan yang dialami komponen ini, cukup menunjukkan perkembangan yang berarti. Yaitu dari 15,01 persen pada tahun 2010 menjadi 16,12 persen pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan investasi yang dilakukan para investor di Kabupaten Natuna masih tetap berlangsung, walaupun belum pada tingkat yang maksimal.

4.5 Ekspor dan Impor Barang dan Jasa

Salah satu komponen PDRB menurut sisi permintaan adalah ekspor dan dari sisi penyediaan adalah impor barang dan jasa. Data ekspor dan impor dapat menjadi ukuran seberapa besar keterbukaan ekonomi suatu daerah terhadap daerah lain termasuk luar negeri. Melalui kedua komponen ini dapat diketahui apakah suatu daerah mengalami surplus atau defisit dalam neraca perdagangannya. Neraca perdagangan dikatakan surplus apabila nilai ekspor lebih besar dari impor, sementara dikatakan defisit apabila terjadi sebaliknya. Komponen ini termasuk variabel penting dalam penciptaan nilai tambah, dimana impor merupakan pengurang bagi nilai ekspor untuk mendapatkan ekspor neto.

Distribusi komponen penggunaan ekspor maupun impor terhadap PDRB Kabupaten Natuna mengalami peningkatan setiap tahunnya. Distribusi komponen ekspor pada tahun 2010 sebesar 22,24 persen meningkat menjadi 23,76 persen di tahun 2011. Demikian halnya dengan komponen impor, dari 40,10 persen pada tahun 2010 menjadi 54,72 persen pada tahun 2011.

Dilihat dari tabel 4.1 atas dasar harga berlaku menginformasikan tentang nilai ekspor dan impor Kabupaten Natuna secara nominal. Hal penting yang perlu diketahui bahwa ternyata ekspor neto Kabupaten Natuna bernilai negatif sehingga neraca perdagangan Kabupaten Natuna mengalami defisit. Secara nominal ekspor neto pada tahun 2010 adalah Rp. -192,4 milyar; dan pada tahun 2011 sebesar Rp. -368,9 milyar. Secara total, nilai impor di Kabupaten Natuna lebih besar jika dibandingkan dengan nilai ekspornya.

Jika ditelusuri lebih detail, negatifnya ekspor neto Kabupaten Natuna berasal dari tingginya nilai impor antar daerah yang melebihi nilai ekspornya. Impor antar daerah di Kabupaten Natuna memang tidak dapat dihindarkan. Pasokan kebutuhan pokok, bangunan, alat-alat berat, dll untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Natuna banyak

didatangkan dari kabupaten/kota lain seperti Tanjungpinang, Batam, Pontianak, Pekanbaru, Surabaya, Jakarta serta daerah lain sesuai dengan rute transportasi laut dan udara. Sementara untuk pembangunan peningkatan perekonomian nilai ekspor masih lebih besar daripada impor.

<http://natunakab.bps.go.id>

TABEL-TABEL

<http://natunakab.bps.go.id>

Tabel 1. PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2009 - 2011 (Jutaan Rupiah)

No	Jenis Penggunaan	2009*)	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Konsumsi Rumah Tangga	472,632.33	524,854.76	693,314.33
	a. Makanan	256,533.14	280,841.66	371,037.93
	b. Bukan Makanan	216,099.19	244,013.10	322,276.40
2	Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	4,436.55	4,788.45	4,892.09
3	Konsumsi Pemerintah	499,939.55	632,788.07	786,604.71
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	89,210.82	99,311.06	101,660.61
5	Perubahan Inventori (Stok)	171,122.34	7,602.34	(26,500.55)
6	Ekspor	119,034.51	239,476.48	282,971.21
	a. Antar Negara	47,228.95	160,821.50	188,588.32
	b. Antar Daerah	71,805.56	78,654.98	94,382.89
7	Impor	378,630.72	431,865.73	651,800.67
	a. Antar Negara	55,863.99	63,427.57	85,833.29
	b. Antar Daerah	322,766.73	368,438.16	565,967.38
	PDRB	977,745.38	1,076,955.42	1,191,141.73

Catatan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. PDRB Kabupaten Natuna atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Penggunaan Tahun 2009 - 2011 (Jutaan Rupiah)**

No	Jenis Penggunaan	2009*)	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Konsumsi Rumah Tangga	233,500.25	269,869.91	334,700.36
	a. Makanan	155,646.39	180,002.27	228,229.50
	b. Bukan Makanan	77,853.86	89,867.65	106,470.86
2	Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	2,334.90	2,493.85	2,659.57
3	Konsumsi Pemerintah	285,679.74	349,698.67	434,702.60
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	11,882.34	13,665.30	15,868.20
5	Perubahan Inventori (Stok)	3,465.48	(47,223.55)	(142,489.11)
6	Ekspor	140,077.18	162,379.53	195,447.68
	a. Antar Negara	54,917.08	63,591.49	73,858.10
	b. Antar Daerah	85,160.10	98,788.04	121,589.58
7	Dikurangi Impor	271,292.79	319,864.45	382,228.75
	a. Antar Negara	36,485.18	46,124.55	53,832.39
	b. Antar Daerah	234,807.61	273,739.90	328,396.36
PDRB		405,647.10	431,019.26	458,660.57

Catatan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2009 - 2011

No	Jenis Penggunaan	2009*)	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Konsumsi Rumah Tangga	48.34	48.74	58.21
	a. Makanan	26.24	26.08	31.15
	b. Bukan Makanan	22.10	22.66	27.06
2	Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	0.45	0.44	0.41
3	Konsumsi Pemerintah	51.13	58.76	66.04
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	9.12	9.22	8.53
5	Perubahan Inventori (Stok)	17.50	0.71	-2.22
6	Ekspor	12.17	22.24	23.76
	a. Antar Negara	4.83	14.93	15.83
	b. Antar Daerah	7.34	7.30	7.92
7	Dikurangi Impor	38.72	40.10	54.72
	a. Antar Negara	5.71	5.89	7.21
	b. Antar Daerah	33.01	34.21	47.51
PDRB		100.00	100.00	100.00

Catatan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2009 - 2011

No	Jenis Penggunaan	2009*)	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Konsumsi Rumah Tangga	57.56	62.61	72.97
	a. Makanan	38.37	41.76	49.76
	b. Bukan Makanan	19.19	20.85	23.21
2	Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	0.58	0.58	0.58
3	Konsumsi Pemerintah	70.43	81.13	94.78
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2.93	3.17	3.46
5	Perubahan Inventori (Stok)	0.85	-10.96	-31.07
6	Ekspor	34.53	37.67	42.61
	a. Antar Negara	13.54	14.75	16.10
	b. Antar Daerah	20.99	22.92	26.51
7	Dikurangi Impor	66.88	74.21	83.34
	a. Antar Negara	8.99	10.70	11.74
	b. Antar Daerah	57.88	63.51	71.60
	PDRB	100.00	100.00	100.00

Catatan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2009 - 2011

No	Jenis Penggunaan	2009*)	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Konsumsi Rumah Tangga	174.33	193.59	255.73
	a. Makanan	168.22	184.17	243.31
	b. Bukan Makanan	182.18	205.71	271.69
2	Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	397.16	428.66	437.94
3	Konsumsi Pemerintah	382.95	484.71	602.54
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	235.79	262.49	268.70
5	Perubahan Inventori (Stok)	-143.57	-6.38	22.23
6	Ekspor	415.85	836.62	988.57
	a. Antar Negara	488.74	1,664.23	1,951.56
	b. Antar Daerah	378.71	414.83	497.78
7	Dikurangi Impor	331.95	378.62	571.44
	a. Antar Negara	447.80	508.43	688.04
	b. Antar Daerah	317.72	362.68	557.12
PDRB		414.32	456.36	504.75

Catatan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2009 - 2011

No	Jenis Penggunaan	2009*)	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Konsumsi Rumah Tangga	952.26	1,100.58	1,364.97
	a. Makanan	1,075.91	1,244.27	1,577.64
	b. Bukan Makanan	774.34	893.83	1,058.97
2	Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	160.66	171.60	183.00
3	Konsumsi Pemerintah	4,850.97	5,938.05	7,381.45
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	183.06	210.52	244.46
5	Perubahan Inventori (Stok)	1.43	-19.55	-59.00
6	Ekspor	439.61	509.60	613.38
	a. Antar Negara	296.47	343.30	398.72
	b. Antar Daerah	638.36	740.51	911.43
7	Dikurangi Impor	384.04	452.79	541.08
	a. Antar Negara	294.56	372.39	434.62
	b. Antar Daerah	403.06	469.89	563.71
PDRB		168.25	178.77	190.24

Catatan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Indeks Berantai PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2009 - 2011

No	Jenis Penggunaan	2009*)	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Konsumsi Rumah Tangga	121.39	111.05	132.10
	a. Makanan	122.22	109.48	132.12
	b. Bukan Makanan	120.41	112.92	132.07
2	Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	105.65	107.93	102.16
3	Konsumsi Pemerintah	94.01	126.57	124.31
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	110.00	111.32	102.37
5	Perubahan Inventori (Stok)	134.36	4.44	-348.58
6	Ekspor	146.00	201.18	118.16
	a. Antar Negara	128.46	340.51	117.27
	b. Antar Daerah	160.41	109.54	120.00
7	Dikurangi Impor	118.10	114.06	150.93
	a. Antar Negara	106.08	113.54	135.32
	b. Antar Daerah	120.47	114.15	153.61
PDRB		109.28	110.15	110.60

Catatan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 8. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Natuna Menurut Penggunaan Tahun 2009 - 2011

No	Jenis Penggunaan	2009*)	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Konsumsi Rumah Tangga	108.09	115.58	124.02
	a. Makanan	108.93	115.65	126.79
	b. Bukan Makanan	106.46	115.43	118.48
2	Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	105.95	106.81	106.65
3	Konsumsi Pemerintah	114.24	122.41	124.31
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	113.68	115.01	116.12
5	Perubahan Inventori (Stok)	17.64	-1,362.68	301.73
6	Ekspor	111.65	115.92	120.36
	a. Antar Negara	112.49	115.80	116.14
	b. Antar Daerah	111.11	116.00	123.08
7	Dikurangi Impor	111.86	117.90	119.50
	a. Antar Negara	121.82	126.42	116.71
	b. Antar Daerah	110.45	116.58	119.97
	PDRB	106.38	106.25	106.41

Catatan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 9. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Natuna Menurut Penggunaan Tahun 2009 - 2011

No	Jenis Penggunaan	2009*)	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Konsumsi Rumah Tangga	202.41	194.48	207.14
	a. Makanan	164.82	156.02	162.57
	b. Bukan Makanan	277.57	271.52	302.69
2	Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	190.01	192.01	183.94
3	Konsumsi Pemerintah	175.00	180.95	180.95
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	750.79	726.74	640.66
5	Perubahan Inventori (Stok)	4,937.91	-16.10	18.60
6	Ekspor	84.98	147.48	144.78
	a. Antar Negara	86.00	252.90	255.34
	b. Antar Daerah	84.32	79.62	77.62
7	Dikurangi Impor	139.57	135.02	170.53
	a. Antar Negara	153.11	137.51	159.45
	b. Antar Daerah	137.46	134.59	172.34
PDRB		241.03	249.86	259.70

Catatan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara